

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Menurut Nila, dkk (2018: 216), menyatakan bahwa teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan keadaan dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa terdapat perasaan puas dan lega ketika organisasi mencapai kesuksesan. Kesuksesan organisasi tercapai berkat adanya maksimalisasi daya guna oleh principals dan manajemen. Teori Stewardship dapat digunakan dalam penelitian ini karena organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya memang terfokus untuk mencapai sasaran organisasi bukannya kepentingan individu. akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (stewards) dengan rakyat (principals), dalam hal ini hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya.

Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor Internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian Internal untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2.1.2 Variabel Keandalan Laporan Keuangan Daerah (Y)

Menurut Mahmudi (2016:2), menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah, disajikan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, dari sisi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya, dan dari sisi eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkemungkinan dengan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan.

Menurut Yusrawati, dkk (2016: 23), menyatakan bahwa “Keandalan laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid”. Jika informasi yang diberikan telah benar dan valid maka masyarakat dapat mempercayai laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (ASP), Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah telah ditentukan berdasarkan empat karakteristik yaitu:

1. Relevan

Penyusunan laporan keuangan yang relevan merupakan informasi yang memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Manfaat informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) untuk menegaskan dan mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu dan memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, serta informasi tersebut harus tepat waktu untuk pengguna informasi dalam pengambilan keputusan.

2. Andal

Keandalan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi keuangan secara benar dan valid. Pelaporan keuangan yang andal memenuhi karakteristik, yaitu :

a. Penyajian Jujur

Penyajian jujur mengandung makna yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Laporan keuangan yang dapat diverifikasi adalah jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi dalam laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. negara dan masih tetap memperhatikan suatu perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara.

3. Dapat dibandingkan

Penyajian informasi laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya baik secara internal maupun secara eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal apabila suatu entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Penyajian pelaporan keuangan bermanfaat jika mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan dan mampu mempelajari informasi tersebut.

Keterandalan Laporan Keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan laporan keuangan dapat terjadi apabila informasi yang tersaji didalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Keandalan ini berpengaruh terhadap relevansi dimana apabila informasi yang disajikan andal, maka informasi dalam laporan keuangan tersebut akan semakin relevan.

Berdasarkan definisi terkait keandalan laporan keuangan di atas, maka peneliti mengambil ketiga teori tersebut dan menghasilkan sintesanya, Keandalan Laporan

Keuangan (Y) adalah laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan andal serta memberikan keyakinan terhadap informasi sehingga informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkementingan.. Berdasarkan sintesa tersebut maka diperoleh dimensi untuk variabel keandalan laporan keuangan ialah (1) relevan dengan indikator penyusunan laporan keuangan, *feedback value*, *predictive value*, dan tepat waktu; (2) andal dengan indikator dapat diverifikasi, netralitas, penyajian jujur dan memenuhi kebutuhan pengguna; dan (3) keyakinan informasi dengan indikator dapat dibandingkan dan penyusunan laporan keuangan jelas dan dapat dipahami. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sintesis keandalan laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Sintesis Keandalan Laporan Keuangan (Y)

Variabel dan Dimensi Operasional	Dimensi	Indikator
Keandalan Laporan Keuangan (Y) adalah laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan andal serta memberikan keyakinan terhadap informasi sehingga informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkementingan.	1. Relevan	1. Penyusunan laporan keuangan
		2. Feedback value
		3. Predictive value
		4. Tepat waktu
	2. Andal	5. Kebenaran laporan keuangan
		6. Kepentingan umum
		7. Kebenaran informasi
		8. Kebutuhan pengguna
	3. Keyakinan Informasi	9. Dapat dibandingkan.
		10. Jelas dan mudah dipahami

Sumber : Diolah penulis (2022)

2.1.3 Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁)

Menurut Wirawan (2009: 7), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia pada pemerintah daerah tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat sehingga akan sesuai dengan SAP yang ditetapkan. Dalam pengelolaan laporan keuangan, sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan. Dalam menghasilkan laporan

keuangan, sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian akuntansi yang memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku guna mencapai tujuan laporan keuangan yang andal.

Menurut Suparman (2014: 3), menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Hullah (2012: 9), menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian sumber daya manusia menurut Afrianti (2011: 25) menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Menurut Delanno (2013: 35) dalam , terdapat 3 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan sendiri terbagi menjadi pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang memiliki kaitan dengan pekerjaannya.

3. Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari periode lamanya seseorang bekerja. Dengan pengawalan, seseorang bisa terbiasa untuk melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti mengambil teori dari Afrianti (2011: 25) dan menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dimensi dari sintesa ini ialah (1) kemampuan dengan indikator kemampuan individu dan latar belakang pendidikan, (2) uraian tugas dengan indikator peran dan fungsi yang jelas dan peran dan tanggungjawab yang jelas, (3) pemahaman proses dan prosedur dengan indikator uraian tugas yang sesuai, pedoman prosedur dan proses akuntansi dan (4) pengembangan keahlian dengan indikator pelatihan teratur dan dana anggaran pelatihan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sintesis kualitas sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Sintesis Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁)

Variabel dan Dimensi Operasional	Dimensi	Indikator
Menurut Afrianti (2011), Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₁) kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.	1. Kemampuan	1. Kemampuan individu.
		2. Latar belakang pendidikan.
	2. Uraian Tugas	3. Peran dan fungsi yang jelas.
		4. Peran dan tanggung jawab yang jelas.
	3. Pemahaman proses dan prosedur	5. Uraian tugas yang sesuai.
		6. Pedoman prosedur
	4. Pengembangan Keahlian	7. Proses Akuntansi
		8. Pelatihan teratur
		9. Dana anggaran pelatihan.

Sumber : Diolah penulis (2022)

2.1.4 Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)

Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas perlu untuk dilakukan pengolahan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Menurut Mulyadi (2014: 21), “Teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan kantor dan telekomunikasi.” Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan data maupun ketepatan hasil data yang diolah serta dapat mengurangi kesalahan yang terjadi sehingga laporan keuangan dapat mencapai kriteria yang andal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Menurut Suparman (2014: 24), “Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas...”. Dengan adanya penggunaan teknologi yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam data laporan keuangan.

Menurut Wardani & Andriyani (2017: 91), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Pemanfaatan adalah perilaku pegawai dalam tugasnya pengukuran pemanfaatan ini berdasarkan frekuensi penggunaan aplikasi yang dijalankan. Saat komputer dan komponen lain yang berhubungan dengan teknologi diintegrasikan ke dalam suatu sistem maka pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan. Pemanfaatan teknologi informasi ini mencakup adanya (a) pengolahan data,

pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan agar dapat membantu kelancaran kegiatan pemrosesan data, penyimpanan data, dan penyebaran informasi dengan mudah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan definisi terkait pemanfaatan teknologi informasi di atas, maka peneliti mengambil seluruh teori tersebut dan menghasilkan sintesanya, pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses kerja yang mencakup pengolahan data, pengolahan informasi dan proses kerja secara elektornik.

Tabel 2.3
Sintesis Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂)

Variabel dan Dimensi Operasional	Dimensi	Indikator
Pemanfaatan teknologi informasi (X ₂) adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses kerja yang mencakup pengolahan data, pengolahan informasi dan proses kerja secara elektornik.	1. Penggunaan teknologi informasi	1. Pelaksanaan tugas
		2. Pemanfaatan jaringan internet
		3. Pengolahan informasi
		4. Sistem Informasi
	2. Kontrol teknologi	5. Sistem Keamanan
		6. Perbaikan tepat waktu
		7. Pemeliharaan peralatan

Sumber : Diolah penulis (2022)

2.1.5 Variabel Sistem Pengendalian Intern (X₃)

Menurut Krismiaji (2015: 4), menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, jika SPI tinggi maka

proses akuntansi dapat diarahkan, diawasi, dan dapat dideteksi adanya penggelapan sehingga laporan keuangan mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan yang andal.

Menurut Mahmudi (2016: 251), Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Tunggal (2010: 195), menyatakan bahwa: Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2014: 163), Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Keandalan Informasi Keuangan
Pengendalian intern ini membuat manajemen bertanggungjawab menyiapkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern dan ekstern perusahaan. Laporan yang disajikan harus dapat diandalkan.
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Pengendalian intern ini dimaksudkan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi
Pengendalian intern dalam perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan pemborosan dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dalam operasi perusahaan.

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut dapat dicapai melalui pengendalian internal yang efektif dan unsur-unsur pengendalian internal juga merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang memadai. Agar tujuan pengendalian internal dapat tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan

komponen-komponen pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem pengendalian intern pada pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Adapun struktur pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari lima unsur pokok, yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment), adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan dari suatu instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
- b. Penilaian Resiko (Risk Assessment), yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian suatu resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.
- c. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), informasi merupakan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- d. Kegiatan Pengendalian (Control Activities), merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dari suatu instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan.
- e. Pemantauan (Monitoring), merupakan suatu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Berdasarkan definisi terkait sistem pengendalian internal di atas, maka peneliti mengambil teori keempat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan

menghasilkan sintesanya, Sistem pengendalian intern pada pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Adapun dimensi berdasarkan definisi tersebut ialah (1) lingkungan pengendalian dengan indikator menetapkan kode etik dan memiliki perilaku dan aturan kebijakan, (2) penilaian risiko dengan indikator analisis risiko secara lengkap dan pengelolaan risiko, (3) kegiatan pengendalian dengan indikator transaksi didukung otorisasi dan pemisahan tugas, (4) Pemantauan informasi dan komunikasi dengan indikator penerapan sistem informasi dan pemeriksaan akuntansi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat sintesa untuk sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sintesis Sistem Pengendalian Intern (X₃)

Variabel dan Dimensi Operasional	Dimensi	Indikator
Sistem pengendalian intern (X ₃) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan (Purba, dkk. 2021)	1. Lingkungan pengendalian	1. Menetapkan kode etik
		2. Perilaku dan aturan kebijakan
	2. Penilaian risiko	3. Analisis risiko secara lengkap
		4. Pengelolaan risiko
	3. Kegiatan Pengendalian	5. Transaksi didukung otorisasi
		6. Pemisahan tugas
	4. Pemantauan Informasi dan komunikasi	7. Penerapan sistem informasi
		8. Pemeriksaan catatan akuntansi

Sumber : Diolah penulis (2022)

2.1.6 Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X₄)

Menurut Baswir (2000: 118), menyatakan bahwa Pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Sementara, menurut Ulum & Sofyani (2016: 129), menyatakan bahwa pengawasan adalah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan

kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Hasil dari pengawasan digunakan untuk membandingkan kinerja yang dilakukan, upaya untuk menanggulangi kesalahan/kejadian yang menyimpang dan mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. Adanya pengawasan keuangan daerah memberikan pengendalian atas kegiatan OPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat diandalkan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan.

Berdasarkan definisi terkait pengawasan keuangan daerah di atas, maka peneliti mengambil teori dari Ulum & Sofyani (2016: 129), "Pengawasan adalah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi". Adapun dimensi dari sintesa tersebut ialah (1) pengawasan dengan indikator pemerintahan yang bersih dan evaluasi kegiatan, (2) penilaian dengan indikator bukti yang cukup dan pencatatan tepat waktu, dan (3) kegiatan pengendalian dengan indikator dokumentasi bukti, sistem pengawasan pelaksanaan tugas dan santar akuntansi pemerintahan.

Tabel 2.5
Sintesis Pengawasan Keuangan Daerah (X₄)

Variabel dan Dimensi Operasional	Dimensi	Indikator
Pengawasan keuangan daerah (X ₄) adalah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Ulum dan Sofyani (2016)).	1. Pengawasan	1. Pemerintahan yang bersih
		2. Evaluasi kegiatan
	2. Penilaian	3. Bukti yang cukup
		4. Pencatatan tepat waktu
	3. Kegiatan pengendalian	5. Dokumentasi bukti
		6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas
		7. Standar akuntansi pemerintahan

Sumber : Diolah penulis (2022)

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melibatkan variable-variabel yang serupa dengan yang diuji oleh penulis dalam penelitian ini yang telah penulis ringkas dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Azzahra Zanabila	Dependen : Y1 = Keterandalan Laporan Keuangan Independen : X1 = Standar Akuntansi Pemerintah X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 = Sistem Pengendalian Intern X4 = Pemanfaatan Teknologi	1. Kualitas SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap Keandalan Laporan Keuangan. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan. 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan dan	Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Variabel Independen : Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Metode :	Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintah Objek Penelitian : Pemerintah desa Kecamatan Lemahsugih. Populasi dan Sampel.

	Asri, 2021)	Informasi	positif terhadap keandalan laporan keuangan.	Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.	
2.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo). (Putri, Dheansi, 2021)	<p>Dependen : Y1 = Keandalan Pelaporan Keuangan</p> <p>Independen : X1 = Kualitas Sumber Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = Sistem Pengendalian Intern.</p>	<p>1. Kualitas SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap Keandalan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan.</p> <p>3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan.</p>	<p>Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah</p> <p>Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.</p> <p>Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.</p>	<p>Variabel Independen : Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>Objek Penelitian : BPKAD Kota Palopo</p> <p>Sampel dan Populasi</p>
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Ende) (Haji Hasan. Muh. Fuad Nur, 2021)	<p>Dependen : Y1 = Keandalan Informasi Pelaporan Keuangan Pemda. Y2 = Ketepatan Informasi Pelaporan Keuangan Pemda</p> <p>Independen : X1 = Sumber</p>	<p>1. SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan informasi pelaporan keuangan pemda.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan</p>	<p>Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah</p> <p>Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern,</p>	<p>Variabel Independen : Komitmen Organisasi</p> <p>Objek Penelitian : SKPD Kabupaten Ende</p> <p>Sampel dan Populasi</p>

		<p>Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi X3 = Komitmen Organisasi X4 = Sistem Pengendalian Internal X5 = Pengawasan Keuangan</p>	<p>Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan infoamsi pelaporan keuangan pemda. 3. Ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 4. Umur administrative terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 5. Rasio kemandirian terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p>	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan. Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.</p>	
4.	<p>Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Fortuna, Zeta, Herawati dan Yunilma, 2020)</p>	<p>Dependen : Y1 = Keandalan Pelaporan Keuangan Pemda Y2 = Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Independen : X1 = Kualitas SDM X2 = Pemanfaatan Teknologi</p>	<p>1. Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan</p>	<p>Variabel Independen : Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda. Objek Penelitian : OPD di Provinsi Sumatera Barat. Sampel dan Populasi</p>

		Informasi X3 = Pengawasan Keuangan Daerah		Daerah. Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.	
5.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) (M. Sufi Irfan Al Idrus, 2020)	Dependen : Y1 = Keandalan Laporan Keuangan Independen : X1 = Kualitas SDM X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.	Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah Objek Penelitian : Pemerintah Desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sampel dan Populasi
6.	Determinan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada SKPD Kabupaten Kulonprogo (Ratna Purnama Sari, 2019)	Dependen : Y1 = Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Independen : X1 = Kualitas SDM X2 = Perkembangan Teknologi Informasi X3 = Sistem Pengendalian	1. Kualitas SDM memiliki pengaruh signifikan atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah. 2. pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh atas	Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern dan	Variabel Independen : Pengawasan Keuangan Daerah Objek Penelitian : SKPD Kabupaten Kulonprogo. Sampel dan Populasi

		Intern	keandalan pelaporan keuangan pemerintah.	Pemanfaatan Teknologi Informasi. Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.	
7.	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Audit Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Dito Aditia Darma Nasution, Nina Andriany Nasution, 2019)	Dependen : Y1 = Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Independen : X1 = Sumber Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = Audit Keuangan Daerah	1. Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan audit keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah kabupaten Aceh Timur.	Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Variabel Independen : Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.	Variabel Independen : Audit Keuangan Daerah Objek Penelitian : Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Sampel dan Populasi
8.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada 43 OPD Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah)	Dependen : Y1 = Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen : X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia X2 =	1. Kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Komitmen Organisasi, pemahaman siste akuntansi keuangan daerah dan sistem	Variabel Dependen : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Variabel Independen : Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalia	Variabel Independen : Komitmen Organisasi dan Pemahaman Sistem Informasi Keuangan Daerah Objek Penelitian : OPD di

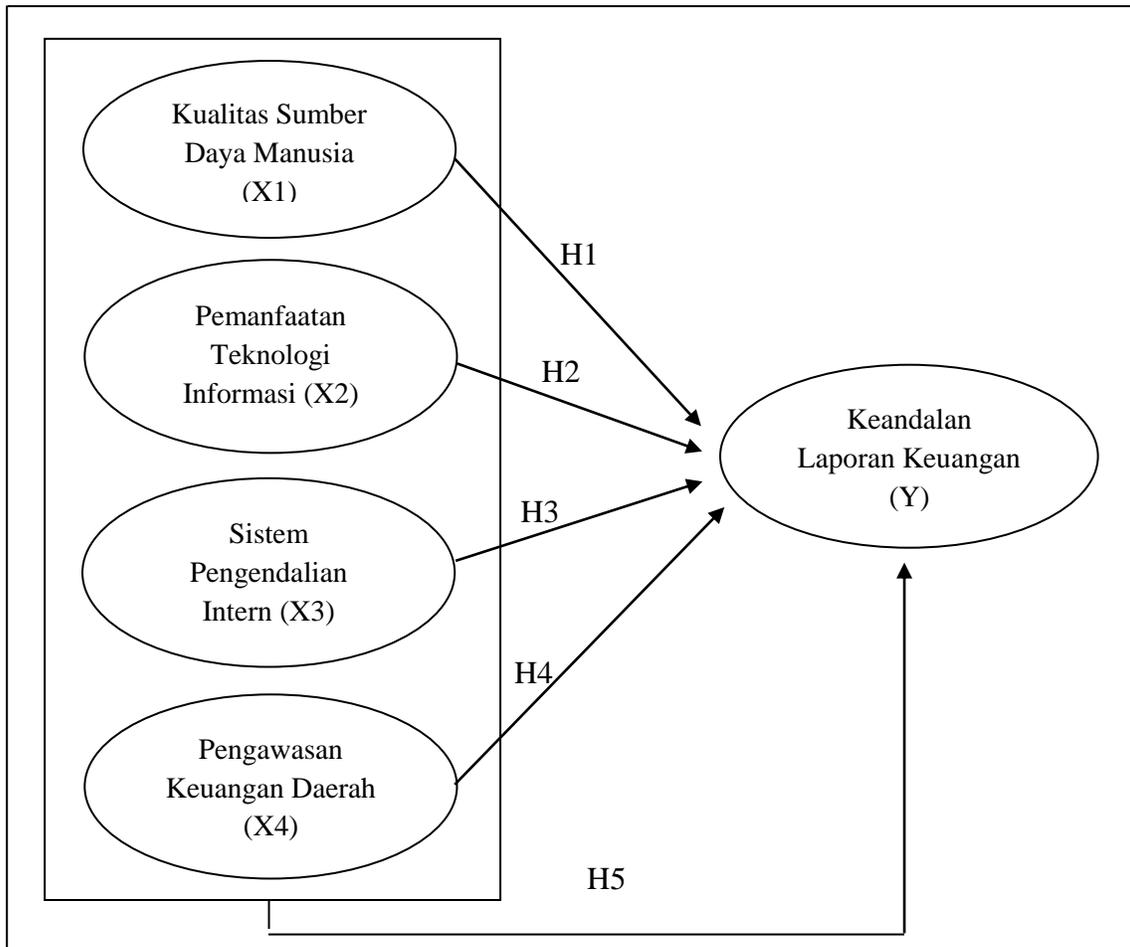
	(Vernanda Vivian Juwira Sari, 2018)	Komitmen Organisasi X3 = Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X4 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.	n Intern. Metode : Asumsi klasik, Regresi Linier Berganda, Uji T dan Uji F.	Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Sampel dan Populasi
--	-------------------------------------	---	--	---	--

Sumber: data yang diolah, 2022

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, sampel dan populasi serta objek penelitian yang berbeda yakni OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018: 60), menyatakan bahwa "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting." Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Berdasarkan teori terkait dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk skematis berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1, dapat dilihat bahwa peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Sistem Pengendalian Intern (X_3) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X_4) secara parsial maupun simultan mempengaruhi Keandalan Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 99), menyatakan bahwa "Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan." Hipotesis penelitian dikatakan sementara, karena jawaban yang tersedia baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum berdasarkan pada fakta empiris. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, Zanabila (2021) mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi menghasilkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sufi Irfan Al Idrus (2020) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dheansi (2021) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan (studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo) menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Menurut penelitian Hullah (2012: 9), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk

mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga ada pengaruh secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dheansi (2021) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan (studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo) menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna, Purnama (2019) mengenai determinan keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Kulonprogo menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh M.Sufi, Idrus (2020) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara) menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan

daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan data maupun ketepatan hasil data yang diolah serta dapat mengurangi kesalahan yang terjadi sehingga laporan keuangan dapat mencapai kriteria yang andal. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga ada pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dheansi (2021) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan (studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo) menghasilkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Haji, dkk (2021) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada SKPD Kabupaten Ende) menghasilkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, Zanabila Asri (2021) mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi menghasilkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krismiaji (2015:4), mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan. Sistem

peendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian ini terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga ada pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Fortuna, dkk (2020) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haji, dkk (2021) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada SKPD Kabupaten Ende) menghasilkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. menurut Ulum & Sofyani (2016: 129), menyatakan bahwa pengawasan adalah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan

kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga ada pengaruh secara parsial Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.5 Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, Zanabila (2021) mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi menghasilkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dheansi (2021) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan (studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo) menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fortuna, dkk (2020) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 menjelaskan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang salah satunya ialah laporan keuangan tersebut harus andal. Menurut Tanjung (2014: 14) menyatakan bahwa, Keandalan laporan keuangan yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dalam hal ini, terdapat determinan terkait keandalan laporan keuangan yang terdiri dari beberapa faktor seperti Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. , Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yaitu tingkat integrasi teknologi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Pengawasan Keuangan Daerah yaitu proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Diduga ada pengaruh secara simultan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.